



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 26
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 20 September 2023
Waktu	: Pukul 15.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Konsultasi terkait Rancangan PKPU, Rancangan Perbawaslu, dan Rancangan Peraturan DKPP
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 25 (tiga puluh lima) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU C. Anggota Bawaslu D. Ketua DKPP E. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Anggota Bawaslu, Ketua DKPP, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda konsultasi terkait Rancangan PKPU, Rancangan Perbawaslu, dan Rancangan Peraturan DKPP, hari Rabu, 20 September 2023, dibuka pukul 16.15 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Anggota Bawaslu, Ketua DKPP, dan Dirjen Politik

dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda konsultasi terkait Rancangan PKPU, Rancangan Perbawaslu, dan Rancangan Peraturan DKPP, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:
 - a. Rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Rancangan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - c. Rancangan PKPU tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut:
 - a. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
 - b. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
3. Rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:
 - a. Rancangan Peraturan DKPP RI tentang Tenaga Ahli DKPP.
 - b. Rancangan Peraturan DKPP RI tentang Tata Naskah Dinas.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Anggota Bawaslu, Ketua DKPP, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda konsultasi terkait Rancangan PKPU, Rancangan Perbawaslu, dan Rancangan Peraturan DKPP, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui:

1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:
 - a. Rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

- b. Rancangan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - c. Rancangan PKPU tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut:
- a. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
 - b. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
3. Rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:
- a. Rancangan Peraturan DKPP RI tentang Tenaga Ahli DKPP.
 - b. Rancangan Peraturan DKPP RI tentang Tata Naskah Dinas.

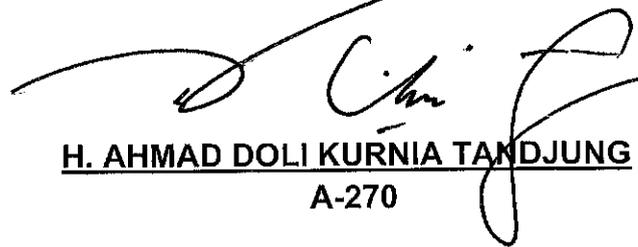
Dengan catatan agar KPU RI, Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.30 WIB.

Jakarta, 20 September 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270